

**HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK HUTANG PIUTANG  
PADA PNM MEKAAR  
(Studi di Desa Sumberrejo Sejahtera Kecamatan Kemiling  
Kota Bandar Lampung)**

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:  
**Mila Damayanti**  
**NPM 1621030361**

**Program Studi: Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)**



**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1441 H / 2020 M**

**HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK HUTANG PIUTANG  
PADA PNM MEKAAR  
(Studi di Desa Sumberrejo Sejahtera Kecamatan Kemiling  
Kota Bandar Lampung)**

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
dalam Ilmu Syari'ah



**Program Studi: Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)**

**Pembimbing I : Drs. H. Chaidir Nasution, M.H.**  
**Pembimbing II : Badruzzaman, S.Ag., M.H.I**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1441 H / 2020 M**

## ABSTRAK

Memberikan pinjaman baik berupa benda ataupun uang itu diperbolehkan dalam islam selama pinjaman tersebut tidak bertentangan dengan syariat islam. Terlebih lagi pada zaman sekarang ini sudah banyak lembaga-lembaga keuangan yang dapat memberi bantuan finansial kepada masyarakatnya salah satunya seperti yang dilakukan di PNM Mekaar yang dalam kegiatannya memberikan bantuan berupa pinjaman kepada masyarakat. Pada dasarnya setiap akad muamalah itu ada prinsip-prinsip yang harus ditaati dan dijalankan diantaranya adalah kegiatan muamalah harus mendatangkan kemaslahatan serta menjauhi segala bentuk hal-hal yang dilarang dalam islam, seperti Riba, Gharar, dan Maysir.

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu (1) Bagaimana Praktik Hutang Piutang Pada PNM Mekaar di Desa Sumberrejo Sejahtera Kecamatan Kemiling Bandar Lampung (2) Bagaimana Hukum Islam tentang Praktik Hutang Piutang Pada PNM Mekaar di Desa Sumberrejo Sejahtera Kecamatan Kemiling Bandar Lampung. Dan tujuan dari penelitian ini adalah, (1) Untuk mengetahui bagaimana Praktik Hutang Piutang Pada PNM Mekaar di Desa Sumberrejo Sejahtera Kecamatan Kemiling Bandar Lampung (2) Untuk mengetahui bagaimana Hukum Islam tentang Praktik Hutang Piutang Pada PNM Mekaar di Desa Sumberrejo Sejahtera Kecamatan Kemiling Bandar Lampung.

Penelitian ini termasuk penelitian *field research* yaitu penelitian gambaran dan menjelaskan sistem serta pelaksanaan Hutang Piutang Pada PNM Mekaar Sumber data yang digunakan yaitu: sumber data primer berupa hasil wawancara dengan Pimpinan PNM Mekaar. Sumber data sekunder diperoleh dari berbagai referensi seperti buku-buku, skripsi dan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan studi kepustakaan. Setelah data terkumpul, lalu di klasifikasikan dan analisis kemudian dibuat kesimpulan.

Hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa (1) Di PNM Mekaar ini memberikan pinjaman uang dengan adanya potongan 5% dari jumlah hutang pokok dan bunga 2,5% yang diangsur setiap minggu selama satu tahun. Potongan dan bunga tersebut menjadi keuntungan bagi pihak PNM Mekaar. (2) Ditinjau dari Hukum Islam, praktik Hutang Piutang pada PNM Mekaar ternyata mendatangkan kemaslahatan bagi para anggotanya, terutama dalam membantu memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Namun pada setiap pinjaman yang diberikan oleh pihak koperasi ada potongan dan dana tambahan dari utang pokok yang diperjanjikan sehingga hal tersebut tergolong kepada riba *qardh*. Sehingga Hutang Piutang di PNM Mekaar ini tidak sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah, meskipun kegiatan Hutang Piutang di PNM Mekaar tersebut mendatangkan kemaslahatan namun jika di dalamnya ada unsur riba, maka kemaslahatan tersebut ditolak oleh syara' karena bertentangan dengan syariat islam dan kemaslahatan yang seperti itu disebut dengan *Mashlahah al-mulghah*.

## **SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mila Damayanti

NPM : 1621030361

Jurusan/Prodi : Mu'amalah

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Hukum Islam Tentang Praktik Hutang Piutang Pada PNM Mekaar (Studi di Desa Sumberrejo Sejahtera Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung)” adalah benar-benar hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain, kecuali pada bagian tertentu yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka penyusun akan bertanggung jawab sepenuhnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.



Bandar Lampung, 02 juli 2020  
Penulis

Mila Damayanti  
NPM. 1621030361



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul : **HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK HUTANG  
PIUTANG PADA PNM MEKAAR (Studi di Desa  
Sumberrejo Sejahtera Kecamatan Kemiling Kota Bandar  
Lampung)**

Nama : **Mila Damayanti**

Npm : **1621030361**

Jurusan : **Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)**

Fakultas : **Syari'ah**

## MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosyah  
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I



**Drs. H. Chaidir Nasution, M.H.**  
**NIP. 195802011986031002**

Pembimbing II



**Badruzzaman, S.Ag., M.H.I.**  
**NIP. 196806241997031003**

**Mengetahui**  
**Ketua Jurusan Mu'amalah**



**Khoiruddin, M.S.I.**  
**NIP. 197807252009121002**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ( UIN )  
RADEN INTAN LAMPUNG FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Letkol H.Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. ( 0721 ) 703289

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **"HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK HUTANG PIUTANG PADA PNM MEKAAR (Studi di Desa Sumberrejo Sejahtera Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung)"** disusun oleh **Mila Damayanti, NPM 1621030361**, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah), Telah di Ujikan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Rabu, 26 Agustus 2020**

**TIM DEWAN PENGUJI:**

**Ketua : Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag**

**Sekretaris : Muslim, S.H.I., M.H.I**

**Penguji Utama : Dr. H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H**

**Penguji I : Drs. H. Chaidir Nasution, M.H**

**Penguji II : Badruzzaman, S.Ag., M.H.I**



**Mengetahui  
Dekan Fakultas Syari'ah**

**Dr. H. Khairuddin Tahmid, M.H**

**NIP. 196210221993031002**



## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

(QS. An-nisa (4) :29)



## PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur dan bahagia yang sangat dalam saya persembahkan kepada orang-orang yang berarti dalam hidup saya:

1. Bapak Miswanto dan Ibu Jumaiti tercinta. Terimakasih saya ucapkan atas dukungan yang selalu diberikan kepada saya sedari kecil sampai saat ini, terimakasih setiap doa yang selalu dipanjatkan untuk kelancaran kesuksesanku, terimakasih untuk semangat yang tiada henti diberikan.
2. Kakak dan adik-adik tersayang, Dhanil Ajitama, Intan Purnama, Agung Prasatya dan Norma Septia terimakasih atas semangat dan motivasi yang selalu kalian berikan
3. Seluruh keluarga, kakak ipar, keponakan dan saudara-saudara yang telah mendukung serta mendoakan saya.
4. Teman dalam segala urusan, teman berdiskusi, teman seperjuangan, Ibrahim Shiddiq, Inas Samalia Lestari, Ria Nur Fitriana, Rafika Juliana, Binti Amanah, Lia Andri Yani, Sukma Wati dan Aprilia Krisdayanti terimakasih atas motivasi yang diberikan.



## **RIWAYAT HIDUP**

Mila Damayanti dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 02 Juli 1998, anak ke dua dari pasangan bapak Miswanto dan ibu Jumaiti. Pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 02 Beringin Raya selesai pada tahun 2010, Madrasah Tsanawiyah (MTS) di MTS Hidayatul Islamiyah selesai pada tahun 2013, Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 07 Bandar Lampung selesai pada tahun 2016 dan melanjutkan pada Fakultas Syariah IAIN Raden Intan lampung dimulai pada semester 1 tahun akademik 2016/2017.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur atas Rahmat Allah Yang Maha Kuasa. Hanya atas berkat Rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Hukum Islam tentang Praktik Hutang Piutang pada PNM Mekaar” (Studi di Desa Sumberrejo Sejahtera Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung) meskipun harus berjuang keras menyelesaikannya. Waktu yang memburu serta semangat dari orang-orang terdekat menjadi pemacu semangat penulis untuk segera menyelesaikannya. Tidak lupa shalawat serta salam untuk jungjungan kita, kekasih tercinta kanjeng Nabi Muhammad SAW serta para sahabat dan para pengikutnya yang setia.

Skripsi ini diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi sarjana (S1) Jurusan Mu’amalah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang ilmu syari’ah. Atas dukungan dan bantuan semua pihak dalam proses penyusunan skripsi ini, saya haturkan ucapan terimakasih sedalam-dalamnya. Secara rinci ucapan terimakasih saya sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Moh. Mukri, M.Ag, selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah mengembangkan UIN Raden Intan Lampung.
2. Dr. KH. Khoiruddin Tahmid, M.H, selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
3. Dr. H. A. Khumaidi Ja’far, S. Ag. M.H, selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Dr. Hj. Zuhraeni, S.H M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.



5. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.Ag, selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
6. Khoiruddin, M.S.I, selaku Ketua Jurusan Mu'amalah UIN Raden Intan Lampung.
7. Drs. H. Chaidir Nasution, M.H, selaku pembimbing I dan Badruzzaman, S.Ag., M.H.I selaku pembimbing II sekaligus pembimbing akademik yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
8. Bapak/ibu Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
9. Kepala Desa Sumberrejo Sejahtera Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung, ketua, bendahara, dan seluruh anggota yang bersangkutan dengan kegiatan Hutang Piutang pada PNM Mekaar yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penelitian ini.
10. Kepada orang tua dan kakak-kakak tercinta yang telah memberikan semangat betapa pentingnya pendidikan kepada penulis sedari kecil.
11. Ibrahim Shiddiq, terimakasih atas support serta semangat yang selalu diberikan.
12. Kepada teman-teman seperjuangan angkatan 2016.
13. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 02 Juli 2020  
Penulis

**Mila Damayanti**  
**NPM. 1621030361**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
SURAT PERNYATAAN .....	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN .....	v
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN .....	vii
RIWAYAT HIDUP .....	viii
KATA PENGANTAR .....	xi
DAFTAR ISI.....	xi

### BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	2
C. Latar Belakang Masalah .....	4
D. Fokus Penelitian .....	8
E. Rumusan Masalah .....	8
F. Tujuan Penelitian .....	9
G. Signifikan Penelitian .....	9
H. Metode Penelitian .....	9

### BAB II LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori .....	15
1. Hutang Piutang (Qardh) dalam Islam .....	15
a. Pengertian dan Dasar Hukum .....	15
b. Rukun dan Syarat .....	23
c. Qardh dalam Lembaga Keuangan Syariah .....	26
d. Hukum Memberi Kelebihan dalam Membayar Utang .....	27
e. Hukum Menunda Pembayaran Utang .....	28
f. Faktor Pendorong Berhutang .....	28



g. Dampak Negatif .....	29
h. Manfaat dan Hikmah .....	29
2. Riba.....	30
a. Pengertian dan Dasar Hukum Riba .....	30
b. Macam dan Sebab Haramnya Riba .....	42
c. Pendapat Ulama tentang ‘Illat Riba.....	46
d. Pengaruhnya dalam Transaksi Ekonomi .....	47
e. Hikmah Diharamkan .....	50
B. Tinjauan Pustaka .....	55

### **BAB III PENYAJIAN DATA LAPANGAN**

A. Gambaran Umum PNM Mekaar Desa Sumberrejo Sejahtera Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung .....	58
1. Sejarah Berdirinya PNM Mekaar .....	58
2. Struktur Organisasi PNM Mekaar.....	60
B. Praktik Hutang Piutang Pada PNM Mekaar di Desa Sumberrejo Sejahtera Kecamatan Kemiling Bandar Lampung.....	63

### **BAB IV ANALISA DATA**

A. Praktik Hutang Piutang Pada PNM Mekaar di Desa Sumberrejo Sejahtera Kecamatan Kemiling Bandar Lampung.....	71
B. Hukum Islam Tentang Praktik Hutang Piutang Pada PNM mekaar	72

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	77
B. Saran .....	79

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Penegasan Judul**

Sebagai langkah awal untuk memahami judul skripsi ini, dan untuk menghindari kesalahpahaman, maka penulis merasa perlu untuk menjelaskan beberapa kata yang menjadi judul skripsi ini. Adapun judul skripsi yang dimaksud adalah **HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK HUTANG PIUTANG PADA PNM MEKAAR (Studi Kasus Di Desa Sumberrejo Sejahtera Kecamatan Kemiling Bandar Lampung)**. Adapun uraian pengertian beberapa istilah yang terdapat dalam judul proposal ini yaitu, sebagai berikut :

Hukum islam adalah sistem hukum yang bersumber dari wahyu agama, sehingga istilah hukum islam mencerminkan konsep yang jauh berbeda jika dibandingkan dengan konsep, sifat dan fungsi hukum biasa. Seperti lazim diartikan agama adalah suasana spiritual dari kemanusiaan yang lebih tinggi dan tidak bisa disamakan dengan hukum. Sebab, hukum dalam pengertian biasa hanya menyangkut soal keduniaan semata.<sup>1</sup> Jadi hukum islam adalah seperangkat peraturan yang berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua ummat yang beragama islam.

Praktik adalah suatu sikap belum otomatis terwujud dalam suatu tindakan (*Overt behavior*). Untuk terwujudnya sikap menjadi suatu perbedaan

---

<sup>1</sup> Said Ramadan, *Keunikan dan Keistimewaan Hukum Islam*, (Jakarta: Firdaus. 1991), h.7.



nyata diperlukan faktor pendukung atau suatu kondisi yang memungkinkan, antara lain adalah fasilitas. Disamping fasilitas, diperlukan faktor dukungan dari pihak lain, misalnya orangtua.

Hutang Piutang (Qardh) adalah meminjamkan uang atas dasar kepercayaan.<sup>2</sup> Qardh merupakan akad tertentu antara dua pihak, satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain dengan ketentuan pihak yang menerima harta mengembalikan kepada pemiliknya dengan nilai yang sama.<sup>3</sup>

PNM Mekaar adalah suatu layanan permodalan berbasis kelompok yang diperuntukan bagi perempuan prasejahtera pelaku usaha mikro, baik yang ingin memulai usaha maupun mengembangkan usaha.

Pada dasarnya setiap akad muamalah itu ada prinsip-prinsip yang harus ditaati dan dijalankan diantaranya adalah kegiatan muamalah harus mendatangkan kemaslahatan serta menjauhi segala bentuk hal-hal yang dilarang dalam islam, seperti Riba, Gharar, dan Maysir.

Jadi yang penulis maksud dari judul skripsi tentang **HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK HUTANG PIUTANG PADA PNM MEKAAR (Studi Kasus di Desa Sumberrejo Sejahtera Kecamatan Kemiling Bandarlampung)** adalah Bagaimana Praktik Hutang Piutang Pada PNM Mekaar menurut Hukum Islam.

## **B. Alasan Memilih Judul**

Adapun alasan-alasan penulis tertarik dalam memilih dan menentukan judul tersebut adalah :

---

<sup>2</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.229

<sup>3</sup> Ibid, h.230

## **1. Alasan Objektif**

Alasan objektifnya adalah masyarakat dalam pemenuhan kebutuhannya membutuhkan dana diluar penghasilan yang diterima secara rutin setiap bulan. Kebutuhan itu bisa berupa keperluan reguler seperti sandang, pangan, papan. kebutuhan yang mendesak seperti sekolah anak, mengembangkan usaha, dan kebutuhan lainnya. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut masyarakat mengambil jalan dengan mencari pinjaman uang. Dengan adanya faktor tersebut, maka dimanfaatkan oleh beberapa kelompok untuk membuka suatu lembaga yang menyediakan pinjaman uang. Salah satunya adalah lembaga PNM Mekaar. Dan dengan melihat dan menyaksikan adanya permasalahan yang terjadi dalam Praktik Hutang Piutang Pada PNM Mekaar yaitu terdapat tambahan nominal dalam pengembalian pinjamannya. Akan tetapi, disisi lain terdapat kemaslahatan bagi masyarakat dalam peminjaman ini salah satunya adalah masyarakat dapat mengembangkan usahanya dengan modal yang dipinjamkan sehingga dapat membantu perekonomian masyarakat dan dalam pengembalian pinjamannya dilakukan secara bertahap sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran karena tidak bisa membayar sekaligus.

## **2. Alasan Subjektif**

Ditinjau dari aspek pembahasan judul penelitian ini sesuai dengan bidang ilmu yang penulis pelajari di bidang Muamalah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung serta adanya teori teori yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

### C. Latar Belakang Masalah

Umat islam sebagai manusia di bumi ini tidaklah hidup seorang diri melainkan hidup bersama atau berdampingan dengan manusia lainnya. Dalam hidup bersama tentu diperlukan adanya hubungan antar satu dengan lainnya. Perhubungan antar sesama manusia dalam Islam disebut muamalat. Muamalat ini dalam ajaran agama Islam merupakan bagian syariat yang wajib dipelajari dan diketahui hukum-hukumnya oleh umat-Nya. Pentingnya mempelajari dan mengetahui hukum-hukum muamalat adalah supaya semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia tidak keluar dari koridor syariah dan tidak melanggar ajaran agama Islam. Semua aturan atau hukum tentang bermuamalat sudah tertuang dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, selain dari situ ada juga sumber hukum yaitu ijtihad para mujtahid seperti Ijmak, Qiyas, Fatwa dan lain sebagainya.

Manusia atau umat Islam diberi kebebasan atau keleluasaan untuk bermuamalat, namun keleluasaan tersebut bukanlah berarti semua cara dapat dikerjakan. Pada dasarnya, manusia bermuamalat adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan berharap selalu ingin dapat memenuhi semuanya. Mengenai kebutuhan manusia dimaksud dapat digolongkan tiga macam yaitu kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang harus diutamakan pemenuhannya setiap hari dan manusia tidak mungkin mengelaknya seperti kebutuhan makan, pakaian, tempat tinggal. Kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan sekunder yang tingkat tidak harus dipenuhi setiap hari tetapi manusia perlu memenuhinya, antarlain peralatan rumah tangga,



kendaraan bermotor dan sebagainya. Kemudian kebutuhan tersier merupakan kebutuhan yang tingkatnya lebih tinggi cenderung ke arah kemewahan dan biayanya juga mahal seperti mobil, kebun, taman bermain dan sebagainya.

Cara manusia memenuhi kebutuhannya berbeda-beda yaitu dengan cara bertransaksi seperti melakukan jual beli, sewa menyewa, bekerja sama dalam berbisnis, utang piutang dan sebagainya. Namun tidak semua manusia dapat memenuhi kebutuhannya dengan mudah dikarenakan faktor kemampuan dari diri manusia tersebut serta tingkat ekonomi yang berbeda. Kalangan dengan tingkat ekonominya tinggi atau dapat disebut berkecukupan akan mudah memenuhi semua kebutuhannya bahkan ia dapat mengusahakan hartanya seperti melakukan jual beli atau berinvestasi. Di sisi lain, masyarakat dengan tingkat ekonomi yang lemah akan sedikit kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya sedangkan harta yang dimilikinya tidak atau kurang dapat memenuhinya sehingga ia akan meminta bantuan kepada orang lain salah satunya dengan jalan berutang uang maupun barang yang akan digantinya pada waktu lain. Inilah alasan timbulnya kegiatan utang piutang, namun ada hal lain yang sedikit berbeda menjadi alasan orang berutang yaitu untuk menambah modal usaha jika sebelumnya digunakan untuk konsumsi maka dengan alasan menambah modal ini uang yang dipinjam akan diusahakan lagi hingga mendapat untung.

Utang piutang dalam Islam adalah salah satu jenis pendekatan untuk bertabarru' dengan berlemah lembut kepada manusia mengasihi dan memberikan kemudahan dari kesulitan yang menyelimuti mereka, yang semua itu ditujukan hanya untuk mendapat ridha Allah SWT semata. Al-Qur'an tidak

mencela utang dan tindakan orang yang berutang, berutang bukan termasuk minta-minta yang dicela oleh ajaran Islam sebab orang yang berutang menerima harta benda dari orang lain dimanfaatkan guna memenuhi kebutuhannya dengan maksud akan membayar kembali hutangnya, serta orang yang memberikan utang kepada orang lain yang sangat membutuhkan adalah hal yang sangat disukai dan dianjurkan karena bernilai sebagai ibadah yang di dalamnya terdapat pahala yang besar.

Memberikan pinjaman atau utang bagi orang yang membutuhkan sangat dianjurkan bahkan bisa menjadi wajib kalau benar-benar memerlukan, sebab jika tidak diberikan pinjaman orang tersebut akan terlantar. Dari aturan yang telah dibuat oleh Allah SWT. Diharapkan dapat terciptanya masyarakat yang saling peduli terhadap nasib orang-orang yang masih dalam kesulitan dan kesusahan. Dengan menitikberatkan pada memberi pertolongan itu dapat diartikan bahwa utang piutang menurut Islam tidak dibenarkan bersifat memberatkan pihak yang berutang, bahkan memberi kecenderungan melonggarkan apabila orang yang berutang benar-benar tidak mampu, maka tidak diperbolehkan menarik manfaat atau keuntungan dari piutang tersebut yang merugikan orang lain.

Dalam kehidupan sehari-hari, telah dijumpai masyarakat yang melaksanakan praktik utang piutang melalui berbagai hal dalam rangka bekerja, mengembangkan usahanya, dan keperluan pribadi. Salah satu contohnya ada sebuah kegiatan utang piutang pada PNM Mekaar yang dilakukan masyarakat di Desa Sumberrejo Sejahtera kecamatan Kemiling kota Bandarlampung. Praktik ini pada dasarnya adalah kegiatan utang piutang

dimana ada seorang pemilik dana baik perseorangan maupun lembaga non bank seperti koperasi dan selanjutnya disebut sebagai kreditur akan meminjamkan sejumlah uang kepada masyarakat yang membutuhkan dan berkedudukan sebagai debitur.

Praktik yang dilakukan pada PNM Mekaar di Desa Sumberrejo Sejahtera yakni kreditur meminjamkan dananya kepada debitur dengan pengembalian diangsur tiap minggu dalam waktu satu tahun dengan potongan diawal sebesar 10% serta tambahan pinjaman atau yang biasa disebut dengan bunga sebesar 25%. Tidak ada syarat khusus yang seperti jaminan dalam berutang, proses peminjaman hanya dengan memberikan fotokopy KTP untuk pendataan.

Permasalahan dalam praktik utang piutang disini adalah kreditur memotong jumlah uang pinjaman diawal sebesar 10% serta membebani pinjaman dengan bunga sebesar 25%. Potongan awal dan tambahan 25% ini tidak sedikit dikhawatirkan akan memberatkan debitur. Bunga yang disyaratkan dalam pinjaman ini sangat berpotensi sebagai salah satu bentuk riba yang dimana telah dilarang dalam Islam.

Kegiatan utang piutang di Desa Sumberrejo Sejahtera telah menjadi kebiasaan masyarakatnya. Bagi warga masyarakat ekonomi lemah upaya tersebut terpaksa dilakukan demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari sisi lain kegiatan utang piutang ini tidak baik untuk dijadikan sebagai kebiasaan karena dikhawatirkan akan berdampak buruk bagi kehidupan orang yang bersangkutan seperti pikiran tidak tenang karena adanya beban yang terus mengganjal selama utang belum lunas dibayar terlebih dengan adanya



tambahan yang disyaratkan serta akan menimbulkan sifat ketergantungan terhadap orang lain dan tidak ada usaha yang lebih keras dalam dirinya karena mereka selalu beranggapan masih bisa berhutang.

Usaha dengan cara berutang kepada kreditur, meskipun terasa berat atas tambahan yang disyaratkan kreditur tapi masih terus terjadi dimasyarakat. Hal ini membutuhkan adanya jawaban yang tegas dan jelas. Untuk itu kemudian mencoba menguraikan masalah tersebut dengan bentuk skripsi yang berjudul Hukum Islam tentang Praktik Hutang Piutang Pada PNM Mekaar (studi di Desa Sumberrejo Sejahtera Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung).

#### **D. Fokus Penelitian**

1. Fokus penelitian ini pada Praktik Hutang Piutang Pada PNM Mekaar di Desa Sumberrejo Sejahtera Kecamatan Kemiling Bandarlampung.
2. Kajian penelitian ini dibatasi hanya dalam lingkup Praktik Hutang Piutang Pada PNM Mekaar di Desa Sumberrejo Sejahtera Kecamatan Kemiling Bandarlampung.

#### **E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang masalah, maka penulis dapat menyimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Hutang Piutang Pada PNM Mekaar di Desa Sumberrejo Sejahtera Kecamatan Kemiling Bandarlampung?
2. Bagaimana menurut hukum Islam tentang Praktik Hutang Piutang Pada PNM Mekaar tersebut?

## **F. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam kasus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Praktik Hutang Piutang Pada PNM Mekaar di Desa Sumberrejo Sejahtera Kecamatan Kemiling Bandarlampung.
2. Untuk mengetahui Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang Praktik Hutang Piutang Pada PNM Mekaar.

## **G. Signifikansi Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai kontribusi serta pengembangan ilmiah terhadap Praktik Hutang Piutang Pada PNM Mekaar di Desa Sumberrejo Sejahtera Kecamatan Kemiling Bandarlampung
2. Manfaat praktis, penelitian ini dilakukan serta dimaksudkan sebagai sarana informasi bagi masyarakat, praktisi hukum serta dapat dijadikan acuan bagi para peneliti berikutnya.

## **H. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan penelitian ini merupakan metode Kualitatif.

<sup>4</sup>Alasannya karena penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis serta proses dan makna lebih tonjolkan dalam penelitian kualitatif. Penggunaan metode tersebut akan disebarkan sebagai berikut:

---

<sup>4</sup> Susiadi, *Metode Penelitian*, (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h.9

## 1. Jenis dan Sifat Penelitian

### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian lapangan (Field Research), yaitu penelitian langsung dilakukan dilapangan atau diresponden guna memperoleh data atau informasi.<sup>5</sup> Pendukung penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan literatur kepustakaan dengan menggunakan referensi yang ada diperpustakaan yang berhubungan dengan masalah yang ingin diteliti, baik berupa buku catatan maupun laporan hasil dari penelitian terdahulu.<sup>6</sup>

### b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis secara terhadap dan berlapis dengan kualitatif. Bersifat deskriptif adalah penelitian yang bertujuan menyelidiki keadaan atau hal lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.<sup>7</sup> Sedangkan kualitatif adalah metode penelitian yang berlandasan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Susiadi As, *Metedeologi Penelitian*, Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h.9

<sup>6</sup> Endang Bakhtiar Purwoastuti, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014). H.19

<sup>7</sup> Moh PabunduTika, *Metedeologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Angkasa, 2006), h.10

<sup>8</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h.137

## 2. Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama (biasanya dapat melalui wawancara, angket, pendapat dan lain-lain).<sup>9</sup> Hal ini data primer diperoleh bersumber dari pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan Praktik Hutang Piutang Pada PNM Mekaar yaitu pegawai PNM Mekaar kemiling dan Nasabah.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data Sekunder yang diperoleh peneliti dari buku-buku yang membicarakan topik-topik yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan judul dan pokok bahasan kajian ini, akan tetapi mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji.<sup>10</sup> Sumber data yang dipakai oleh penulis adalah beberapa sumber yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan, antara lain : Al-Qur'an. Al-Hadist, Buku, Kitab-kitab Fiqh, Skripsi, dan Literature-literature lainnya yang mendukung.

## 3. Pengumpulan Data

Dalam usaha pengumpulan data untuk penelitian ini, digunakan beberapa metode, yaitu :

---

<sup>9</sup> Syariffudin Hidayat Sdarmayanti, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Mandar Maju, 2002), h.73

<sup>10</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h.137



a. Wawancara

Metode wawancara adalah teknik pengumpulan data untuk memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara mengajukan suatu pertanyaan langsung kepada pihak yang bersangkutan.<sup>11</sup> Praktisnya penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada pihak-pihak yang melakukan Praktik Hutang Piutang Pada PNM Mekaar.

b. Dokumentasi

Teknik Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa Catatan, Transkrip, Buku, Surat kabar, Majalah, Prasasti, Notulen rapat atau sebagainya.<sup>12</sup> Dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah berupa Gambar-gambar yang berkaitan dengan Praktik Hutang Piutang Pada PNM Mekaar.

#### 4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakter tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajaridan kemudian ditarik kesimpulan.<sup>13</sup> Adapun populasi dalam hal penelitian berjumlah 168 orang yang terlibat dalam praktik Hutang Piutang pada PNM Mekaar Desa Sumberrejo Sejahtera Kemiling Bandar Lampung, terdiri dari 18 pegawai PNM Mekaar dan 150 nasabah.

---

<sup>11</sup> Ibid, h.188

<sup>12</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h.114

<sup>13</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 80

#### b. Sampel

Sampel adalah bagian dari suatu subjek atau objek yang mewakili populasi. Sampel ini merupakan cerminan dari populasi yang sifat-sifatnya akan diukur dan mewakili populasi yang ada. Dengan adanya sampel ini maka proses penelitian akan lebih mudah dan sederhana.

Menurut Suharsimi Arikunto bahwa untuk sekedar ancer-ancer maka apabila subjek kurang dari seratus lebih baik diambil semua sehingga penelitian termasuk penelitian populasi. Tetapi, jika jumlah subjeknya besar, dapat diambil 10-15% atau 20-25% atau lebih.

Karena populasi dalam sampel ini lebih dari seratus, yaitu berjumlah 168, maka sampel diambil 10% jadi  $168 \times 10\% = 16,8$  sampel dibulatkan menjadi 17. Sampel terdiri dari 4 pegawai PNM Mekaar Kemiling dan 13 Nasabah. Teknik pengambilan sampel adalah menggunakan random sampling. Menurut Sugiyono, teknik sampel random adalah teknik pengambilan sampel dari anggota populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Setiap nasabah punya kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel.

### 5. Pengelolaan Data

Data yang telah terkumpul kemudian diolah. Pengelolaan data dilakukan dengan cara :

#### a. Pemeriksaan data (*Editing*)

*Editing* yaitu pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kata lain.

b. Sistematika data

Sistematika data yaitu menetapkan data menurut kerangka sistematika berdasarkan urutan masalah.

## 6. Analisa Data

Analisis data merupakan suatu proses penyelidikan, dan pengaturan secara sistematis transkrip, wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lainnya sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dan informasikan kepada orang lain.<sup>14</sup>

Setelah data terkumpul, selanjutnya data tersebut akan dianalisis dengan menggunakan kualitatif melalui cara berfikir deduktif yaitu mempelajari suatu gejala umum yang kebenarannya telah diketahui atau diyakini, dan berfikir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan baru yang bersifat lebih khusus. Sedangkan metode induktif yaitu dari fakta-fakta yang sifatnya khusus atau peristiwa-peristiwa yang konkrit. Kemudian dari fakta tersebut ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan Praktik Hutang Piutang Pada PNM Mekaar.

---

<sup>14</sup> Rulam Ahmadi, *Metode Penelitian Kualitatif Jilid III* (Yogyakarta: Ar Ruz Media, 2016), h.229

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Kajian Teori

##### 1. Hutang Piutang (*Qardh*) dalam Islam

###### a. Pengertian dan Dasar Hukum

Dalam Islam utang piutang dikenal dengan istilah *al-qardh*, *Qardh* dikalangan ahli bahasa di definisikan sebagai memotong. *Qardh* berasal dari bahasa Arab yang berarti meminjamkan uang atas dasar kepercayaan<sup>15</sup>. Kata-kata ini kemudian diadopsi dalam ekonomi konvensional menjadi kata kredit, yang mempunyai makna yang sama yaitu pinjaman atas dasar kepercayaan.

Secara etimologi, *qardh* berarti potongan harta yang dibayarkan kepada *muqtaridh* dinamakan *qardh*, sebab merupakan potongan dari harta *muqridh* (orang yang membayar)<sup>16</sup>. Dengan demikian *al-qardh* dapat dipahami sebagai harta yang diserahkan kepada orang yang berutang, sebab harta yang diserahkan merupakan satu potongan dari harta orang yang memberikan utang.<sup>17</sup>

Utang piutang yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan baik berupa uang maupun benda dalam jumlah tertentu dengan perjanjian yang telah disepakati bersama, dimana orang yang diberi tersebut harus mengembalikan uang atau benda yang diutangnya

---

<sup>15</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.167.

<sup>16</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2016), h.229.

<sup>17</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.151.



dengan jumlah yang sama tidak kurang atau lebih pada waktu yang telah ditentukan.<sup>18</sup> Jika ada tambahan waktu mengembalikan utang itu lebih dari jumlah semestinya harus diterima, dan tambahan itu telah menjadi perjanjian sewaktu akad maka tambahan dari jumlah yang semestinya, tidak halal atas piutang mengambilnya.<sup>19</sup>

Pengertian utang-piutang ini sama dengan pengertian perjanjian pinjam-meminjam yang dijumpai dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1754 yang berbunyi: Pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian yang mana pihak yang satu memberikan kepada pihak lain suatu jumlah barang atau uang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang lain ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari barang atau uang yang dipinjamnya.

Beberapa Ulama berbeda pendapat dalam mengemukakan pengertian utang-piutang, diantaranya yaitu:

- 1) Menurut Syafi'iyah yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich bahwa *qardh* (utang-piutang) dalam istilah syara' diartikan dengan sesuatu yang diberikan kepada orang lain (yang pada suatu saat harus dikembalikan)<sup>20</sup>
- 2) Menurut Hanafiyah yang dikutip oleh Wahbah az-Zuhaili *qardh* (utang-piutang) adalah harta yang memiliki kesepadanan yang diberikan untuk ditagih kembali. Atau dengan kata lain, suatu

<sup>18</sup> Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), h.123.

<sup>19</sup> Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: Cv. Toha Putra, 1978), h.414.

<sup>20</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Amzah, Cet I, 2010, hlm. 274.

transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu.<sup>21</sup>

- 3) Menurut Yazid Afandi *qardh* (utang-piutang) adalah memberikan harta kepada orang lain tanpa mengharap imbalan, untuk dikembalikan dengan pengganti yang sama dan dapat ditagih kapan saja sesuai kehendak yang menghutangi. Akad *qardh* adalah akad tolong menolong bertujuan untuk meringankan beban orang lain.<sup>22</sup>
- 4) Menurut Gufron A. Mas'adi piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan pengembalian yang sama. Sedangkan utang adalah kebalikan pengertian piutang, yaitu menerima sesuatu (uang/barang) dari seseorang dengan perjanjian ia akan membayar atau mengembalikan utang tersebut dalam jumlah yang sama pula.<sup>23</sup>
- 5) Al-Bahuti mendefinisikan *qardh* secara etimologi adalah potongan, adapun secara terminologi adalah pembayaran atau penyerahan sejumlah uang kepada orang yang akan menggunakannya, namun ada kewajiban untuk mengembalikannya.<sup>24</sup>

Sebagaimana pengertian yang telah dijelaskan, *qardh* (utang-piutang) adalah akad yang dilakukan oleh dua orang dimana salah satu

---

<sup>21</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid V, Jakarta: Gema Insani, Cet. 1, 2011, h.374.

<sup>22</sup> M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, Cet 1, 2009, h. 137.

<sup>23</sup> Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Ed 1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002 h. 171

<sup>24</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.168.

dari dua orang tersebut mengambil kepemilikan harta dari lainnya dan ia menghabiskan harta tersebut untuk kepentingannya, kemudian ia harus mengembalikan harta tersebut

Selain itu akad dari utang piutang sendiri adalah akad yang bercorak *ta''awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya, karena setiap transaksi yang dilakukan harus disertai dengan ijab dan qabul untuk memenuhi suatu unsur yang harus ada dalam sebuah akad.

Maka dapat dipahami bahwa *qardh* adalah pinjaman uang yang diberikan seseorang kepada pihak lainnya, dimana pinjaman tersebut digunakan untuk usaha atau menjalankan bisnis tertentu. Pihak peminjam berkewajiban mengembalikan pinjaman tersebut sesuai dengan jumlah yang dipinjamnya. *Qardh* juga tidak berbunga karena prinsip dalam *qardh* ini adalah tolong menolong.

Berdasarkan Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah [2: 245]

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya : *Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.*<sup>25</sup>

<sup>25</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Semarang:CV. Toha Putra), 1989), h.52

Allah berfirman dalam QS. Al-Hadid [57: 11)

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya : *Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh harta yang banyak.*

Dalam QS. Al-Maidah [5: 2] juga ditegaskan:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya : *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.*

Dalam transaksi utang-piutang terdapat nilai luhur dan cita-cita sosial yang sangat tinggi yaitu tolong-menolong dalam kebaikan. Dengan demikian, pada dasarnya pemberian utang atau pinjaman pada seseorang harus didasari niat yang tulus sebagai usaha untuk menolong sesama dalam kebaikan. Ayat ini berarti juga bahwa pemberian utang atau pinjaman pada seseorang harus didasarkan pada pengambilan manfaat dari sesuatu pekerjaan yang dianjurkan oleh agama atau jika tidak ada larangan dalam melakukannya.

Al-Khazin dalam menafsirkan surat Al-Maidah diatas mengatakan bahwa yang dimaksud dengan tolong menolonglah kamu dalam berbuat kebaikan dan ketakwaan artinya bertolong-menolonglah dalam upaya melakukan kebaikan dan ketakwaan. kebaikan ini menurut Ibn Abbas maksudnya mengikuti sunnah sedangkan pengertian dari janganlah kamu dalam tolong menolong untuk berbuat dosa dan

permusuhan, maksudnya jangan bertolong menolong dalam kekafiran dan kedzoliman.<sup>26</sup>

Prinsip ini mesti mewarnai seluruh aspek kehidupan termasuk aspek hukum. Artinya dalam pembentukan materi hukum haruslah mengacu kepada prinsip ini, dalam arti ketetapan yang dibuat haruslah mengacu kepada prinsip ini, dalam arti ketetapan yang harus mencerminkan sikap tolong menolong antar umat manusia dalam rangka mencapai kebaikan dan ketaatan kepada Allah.

Namun harus menghindari tolong menolong dalam hal keburukan apalagi tolong menolong itu akan mengarah kepada kefakiran atau penyimpangan dari ketentuan Allah.<sup>27</sup>

Selain dasar hukum yang bersumber dari al-Qur'an sebagaimana di atas, pemberian utang atau pinjaman juga didasari Hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah sebagai berikut:

عَنْ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ مَسْعُودُ ابْنِ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً (رواه ابن ماجه)

Artinya : *Dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah SAW. Bersabda, Tidak ada seorang muslim yang mengutangi muslim lainnya dua kali kecuali yang satunya seperti sedekah.* (H.R. Ibnu Majah)<sup>28</sup>

Maksud Hadits di atas adalah bahwa memberi utang kepada seseorang disaat dia memerlukannya, lebih besar pahalanya dari pada

<sup>26</sup> Mohammad Rusfi, *Filsafat Harta: Prinsip Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Harta, Al-Adalah* vol 13 no 2, (Bandar Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2016) h.254. (on-line), tersedia di

<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/1864/1519> (22 juli 2019, pukul 20:30 WIB) dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

<sup>27</sup> *Ibid*, h.254.

<sup>28</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz Tsani, Beriut/Lebanon: Darul Fikr, 1990, h.15.



memberi sedekah. Karena utang hanya dibutuhkan oleh orang yang dalam kesempitan. Rasulullah bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةِ عَشْرٍ فَقُلْتُ يَا جِبْرِيلُ مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ لِأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ (رواه ابن ماجه)

Artinya : *Dari Anas ibn Malik r.a. Berkata, Rasulullah SAW. Bersabda: Pada malam aku diisra"kan aku melihat pada sebuah pintu surga tertulis shadaqah dibalas sepuluh kali lipat dan utang dibalas delapan belas kalilipat." Lalu aku bertanya: "Wahai Jibril mengapa mengutangi lebih utama dari pada shadaqah?" Ia menjawab: "Karena meskipun seorang pengemis meminta-minta namun masih mempunyai harta, sedangkan seorang yang berutang pastilah karena ia membutuhkannya." (H.R. Ibnu Majah)<sup>29</sup>*

Maksud Hadits di atas adalah bahwa dalam hal ini, Nabi SAW.

Ingin memberikan *sugesti* agar orang tidak berat dalam memberikan pinjaman.<sup>30</sup> Karena terkadang orang itu merasa keberatan bila harus memberikan pinjaman apalagi bersedekah, bilamana ketika keadaan ekonominya pas-pasan. Tetapi dengan jaminan pahala yang lebih, memberikan pinjaman akan terasa lebih ringan ketika seseorang belum mampu memberikan sedekah.

Selain dasar hukumnya berasal dari al-Qur"an dan Hadits Rasulullah, para Ulama telah bersepakat bahwa *al-qardh* (utang-piutang) boleh dilakukan. Kesepakatan Ulama" ini didasari pada tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak

<sup>29</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz Tsani, Beriut/Lebanon: Darul Fikr, 1990, h.16.

<sup>30</sup> M. Thalib, *Pedoman Wiraswasta dan Manajemen Islamy*, Solo: CV. Pustaka Mantiq, Cet 1, 1992, h. 125.

ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.<sup>31</sup>

Sebaik-baik perkara adalah menolong orang yang teraniaya, sedangkan yang mendekatkan kepada rahmat-Nya adalah memudahkan kepentingan orang-orang yang membutuhkan. Islam menganjurkan dan menyukai orang yang meminjamkan hartanya, dan membolehkan bagi orang yang diberikan utang, serta tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang makruh karena ia menerima harta untuk dimanfaatkan guna memenuhi kebutuhan hidupnya, serta apa yang dilakukan peminjam tersebut merupakan bentuk *taqqarub* kepada Allah.

Disamping itu, hukum *qardh* berubah sesuai dengan keadaan, cara dan proses akadnya. Adakalanya hukum *qardh* boleh, kadang wajib, makruh, dan haram. Jika orang yang berutang adalah orang yang mempunyai kebutuhan sangat mendesak, sedangkan orang yang diutangi orang kaya, maka orang yang kaya itu wajib memberinya utang.

Jika pemberi utang mengetahui bahwa pengutang akan menggunakan uangnya untuk berbuat maksiat atau perbuatan yang makruh maka memberi utang hukumnya haram atau makruh sesuai dengan kondisinya. Jika seseorang yang berutang bukan karena adanya kebutuhan yang mendesak, tetapi untuk menambah modal perdagangannya maka hukumnya mubah. Seseorang boleh berutang jika

---

<sup>31</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001, hlm. 132-133.

dirinya yakin dapat membayarnya, seperti jika ia mempunyai harta yang dapat diharapkan dan mempunyai niat menggunakannya untuk membayar utangnya. Jika hal ini tidak ada pada diri pengutang maka ia tidak boleh berutang.<sup>32</sup>

b. Rukun dan Syarat

Rukun *qardh* menurut ulama Hanafiyah adalah ijab dan kabul. Sementara itu menurut jumhur ulama rukun *qardh* ada tiga, yaitu: 1) dua orang yang berakad yang terdiri dari: *muqridh* (yang memberikan utang) dan *muqtaridh* (orang yang berutang). 2) *Qardh* (barang yang dipinjamkan). 3) Shighat ijab dan kabul. Syarat *Qardh* adalah:

- 1) Dua pihak yang berakad, yakni orang yang berutang (*muqtaridh*) dan orang yang memberikan pinjaman (*muqaridh*), diisyaratkan:
  - a) *Baligh*, berakal cerdas dan merdeka, tidak dikenakan hajru. Artinya cakap bertindak hukum.
  - b) *Muqaridh*, adalah orang yang mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan akad *tabaru'*. Artinya harta yang diutang merupakan miliknya sendiri. Menurut ulama Syafi'iyah *ahliyah* ( kecakapan atau kepantasan) pada akad *qardh* harus dengan kerelaan, bukan dengan paksaan. Berkaitan ini, ulama Hanabilah merinci syarat *ahliyah at-tabaru'* bagi pemberi utang bahwa seorang wali anak yatim tidak boleh mengutangkan harta anak yatim itu dan *Nazhir* (pengelola) wakaf tidak boleh mengutangkan harta wakaf. Syafi'iyah merinci permasalahan

---

<sup>32</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) hal. 231

tersebut. Mereka berpendapat bahwa seorang wali tidak boleh mengutangkan harta orang yang dibawah perwaliannya kecuali dalam keadaan darurat.

2) Objek atau barang yang diutangkan (*qardh*)

- a) Harta yang dihutangkan merupakan *mal misliyat* yakni harta yang dapat ditakar<sup>33</sup> (*makilat*), harta yang dapat ditimbang (*mauzunat*), harta yang diukur (*zari'iyat*), harta yang dapat dihitung (*addiyat*). Ini merupakan pendapat ulama Hanafiyah.
- b) Setiap harta yang dapat dilakukan jual beli salam, baik itu jenis harta *makilat,mauzunat,addiyat*. Ini merupakan pendapat ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah. Atas dasar ini tidak sah mengutangkan manfaat (jasa). Ini merupakan pendapat mayoritas fuqaha.
- c) *Al-Qabadh* atau penyerahan. Akad utang piutang tidak sempurna kecuali dengan adanya serah terima, karena didalam akad *qardh* ada *tabbaru'*. Akad *tabbaru'*, tidak akan sempurna kecuali dengan serah terima (*al-qabadh*).
- d) Utang piutang tidak memunculkan keuntungan bagi *muqaridh* (orang yang mengutangkan).
- e) Utang itu menjadi tanggung jawab *muqtaridh* (orang yang berhutang). Artinya, orang yang berhutang mengembalikan utangnya dengan harga atau nilai yang sama.

---

<sup>33</sup> Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Indonesia*, (Lampung: Permatanet, 2016), h. 125

- f) Barang itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan dalam islam (*mal mutaqawwim*)
  - g) Harta yang diutangkan diketahui, yakni diketahui kadar dan sifatnya.
  - h) Pinjaman boleh secara mutlak, atau ditentukan dengan batas waktu.
- 3) Shighat ijab dan kabul

Akad *qardh* dinyatakan sah dengan adanya ijab dan kabul berupa lafal *qardh* atau yang yang sama pengertiannya, seperti *aku memberimu utang* atau *aku mengutangimu*. Demikian pula kabul sah dengan semua lafal yang menunjukan kerelaan, seperti *aku berutang*, atau *aku menerima*, atau *aku ridha* dan lain sebagainya.

Akad utang piutang dimaksudkan untuk tolong menolong dengan sesama, bukan untuk mencari keuntungan dan eksploitasi. Karena itu, dalam utang piutang tidak dibenarkan mengambil keuntungan oleh pihak *muqaridh* (orang yang mengutangkan). Apabila diisyaratkan ada tambahan dalam pembayaran, hukumnya haram dan termasuk riba.

Jika tidak diisyaratkan dan tidak ditentukan ada tambahan dalam pembayaran utang piutang, tidak termasuk riba. Apabila tidak ada inisiatif atau niat dari yang berutang untuk melebihi pembayaran utangnya merupakan hal yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad Saw., seperti yang terdapat dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah yang menceritakan bahwa seorang laki-laki telah menagih utangnya kepada Nabi Saw. dihadapan sahabat. Kemudian, Nabi Saw., memerintahkan sahabat untuk



membayar dengan yang sama. Sahabat menyatakan, tidak ada kecuali nilainya lebih dari yang diutangkan.

c. Qardh dalam Lembaga Keuangan Syariah

Uang yang dititipkan nasabah kepada Lembaga Keuangan Syariah yang biasanya menggunakan akad *wadi'ah* dapat berubah menjadi *qardh*. Perubahan ini terjadi apabila pihak Lembaga Keuangan Syariah menggunakan dana tersebut untuk dimanfaatkan atau diinvestasikan dalam kegiatan bisnis atau penggunaan dana tersebut untuk dikembangkan. Namun demikian, bila ada keuntungan yang dipatok dengan bunga tertentu, maka hal ini tidak dibenarkan dalam syariat. Walaupun pihak bank tidak memberikan bunga, namun menggunakan dana titipan tersebut untuk melakukan kredit ribawi dan praktik-praktik yang diharamkan lainnya, hal ini juga tidak diperbolehkan.

Berkaitan dengan deposito, al-Zuhaili menjelaskan bahwa menurutnya ada tiga macam, *pertama*, deposito yang mempunyai nilai yang terus bertambah karena diinvestasikan. *Kedua*, deposito yang memiliki pemasukan lancar, dimana keuntungan atau laba dapat ditarik setiap setengah atau satu tahun, sementara pokok pinjaman masih utuh. *Ketiga*, deposito yang tidak memberikan<sup>34</sup> laba pasti setiap tahun, namun nasabah diberi keuntungan dengan cara undian.

Berdasarkan tiga jenis deposito diatas, jenis pertama dan kedua menurut Wahbah al-Zuhaili masuk dalam kategori *qardh*, namun yang dilarang, karena ada keuntungan ribawi. Begitu juga jenis yang ketiga,

---

<sup>34</sup> Imam Mustafa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 173

meskipun tidak memberikan laba pasti, namun pemberian hadiah dengan undian hanyalah *hilah* untuk memberikan bunga kepada nasabah pemberi pinjaman.<sup>35</sup>

d. Hukum Memberi Kelebihan dalam Membayar Utang

Melebihi pembayaran dari jumlah yang diterima oleh orang yang berutang dapat dikemukakan sebagai berikut:

1) Kelebihan yang tidak diperjanjikan

Apabila kelebihan pembayaran dilakukan oleh orang yang berutang tanpa didasarkan pada perjanjian sebelumnya, dan hanya sebagai ucapan terimakasih (kebaikan), maka kelebihan tersebut hukumnya boleh (halal) bagi yang memberi utang.<sup>36</sup>

2) Kelebihan yang diperjanjikan

Apabila kelebihan pembayaran yang dilakukan oleh orang yang berutang kepada orang yang memberi utang didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati sebelumnya, maka hukumnya tidak boleh, dan haram bagi orang yang memberi utang untuk menerima kelebihan tersebut.

Dengan demikian jelaslah, bahwa melebihi pembayaran utang dengan suatu perjanjian sebelumnya hukumnya haram, tetapi melebihi pembayaran utang sebagai ucapan terimakasih dan tanpa perjanjian sebelumnya adalah boleh (halal).

e. Hukum Menunda Pembayaran Utang

Bagi orang yang mampu membayar utang pada waktu yang telah ditentukan, maka ia termasuk orang yang terpuji.

---

<sup>35</sup> *Ibid*, h.174

<sup>36</sup> Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Indonesia*, (Lampung: Permatanet, 2016),h.125

Sebaliknya bagi orang yang suka menunda-nunda atau enggan membayar utang, padahal ia mampu untuk membayarnya, maka ia termasuk orang yang dzalim dan akan memperoleh dosa besar..<sup>37</sup>

f. Faktor Pendorong Berhutang

Dalam hal ini factor pendorong Berhutang adalah Keadaan ekonomi yang memaksa (darurat) atau tuntutan kebutuhan ekonomi.

g. Dampak Negatifnya

Utang dapat berakibat buruk bagi orang yang membiasakan melakukannya. Diantara akibat buruk itu adalah sebagai berikut:

- 1) Dapat menggoncangkan pikiran, sebab dengan utang pikiran tidak tenang, seolah-olah selalu dikejar-kejar orang.
- 2) Dapat mengganggu nama baik keluarga, sebab para penagih utang bisa datang setiap saat, sehingga bisa membuat orang yang berutang menjadi malu.
- 3) Utang yang sudah lama belum terbayar, akan membuat sakit hati (emosi) bagi orang yang memberikan utang. Sehingga hubungan yang selama ini baik menjadi renggang bahkan bisa menjadi putus.
- 4) Jika utang seseorang sudah menumpuk (banyak) dan belum bisa dibayar, maka dapat menghambat bagi orang yang memberikan utang.
- 5) Jika utang seseorang sudah terlanjur banyak, dan tidak bisa membayar utangnya, maka dapat menyebabkan orang yang berhutang berbuat nekat untuk melakukan perbuatan jahat, seperti mencuri, merampok, merampas, dan lain sebagainya demi untuk membayar utangnya tersebut..<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Indonesia*, (Lampung: Permatanet, 2016),h.127

<sup>38</sup> *Ibid.* h.128

#### h. Manfaat dan Hikmah

Di antara manfaat *qardh* yaitu sebagai berikut:

- 1) Memungkinkan seseorang yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapatkan talangan jangka pendek.
- 2) *Qardh* juga merupakan salah satu ciri pembeda antara bank syariah dengan bank konvensional yang didalamnya terkandung misi sosial disamping misi komersial.
- 3) Adanya misi sosial-kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan akan meningkatkan loyalitas antara sesama manusia.<sup>39</sup>

## 2. Riba

### a. Pengertian dan Dasar Hukum

Riba secara bahasa (*etimologis*) – berasal dari kata زد يسيد bermakna tambah. Dalam pengertian lain secara harfiah, *riba* juga berarti tumbuh (*growth*), naik (*rise*), membengkak (*swell*) dan tambahan (*addition*).<sup>40</sup> Adapun menurut istilah (*terminologis*) riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil.<sup>41</sup> Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.

<sup>39</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Depok:PT. RajaGrafindo Persada, 2015) , h. 232

<sup>40</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama Graffiti, 2007, h. 9.

<sup>41</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. I, 2008, h. 88.

Riba sering juga diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebagai *Usury* dengan arti tambahan uang atas modal yang diperoleh dengan cara yang dilarang oleh syara', baik dengan jumlah tambahan yang sedikit atau pun dengan jumlah tambahan banyak. Kata *usury* dipakai untuk menunjukkan pembebanan tingkat suku bunga yang tidak masuk akal atau di atas tingkat suku bunga legal yang relatif tinggi.<sup>42</sup>

Riba identik dengan bunga bank atau rente, menurut istilah rente berasal dari bahasa Belanda yang juga dikenal dengan bunga. Sering kita dengar di tengah-tengah masyarakat bahwa rente disamakan dengan riba, pendapat itu disebabkan karena rente merupakan pembayaran lebih atas modal pokok yang dipinjam oleh *muqtaridh* kepada pihak *muqridh*.<sup>79</sup> Sedangkan uang yang lebih dari itu adalah riba, dan riba itu haram hukumnya. Kemudian dilihat dari segi lain bahwa *muqridh* itu hanya tahu menerima uang, tanpa resiko apa-apa. Pihak *muqridh* tidak ingin tahu apakah orang yang meminjam uang itu rugi atau untung.

Menurut istilah, ulama fiqh mendefinisikannya berikut ini.

1) Ulama Hanabilah

Riba adalah Pertambahan sesuatu yang dikhususkan

2) Ulama Hanafiyah.

Riba Tambahan pada harta pengganti dalam pertukaran harta dengan harta.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Zamir Iqbal et al, *Pengantar Keuangan Islam: Teori dan Praktik*, Jakarta: Kencana, Cet I, 2008, h. 90.

<sup>43</sup> *Ibid*, h.260



### 3) Ulama Syafi'iyah

Riba adalah bentuk transaksi dengan cara menetapkan pengganti tertentu (*iwadh makhshush*) yang tidak diketahui kesamaannya (dengan yang ditukar), dalam ukuran syar'i pada saat transaksi, atau disertai penangguhan terhadap kedua barang yang dipertukarkan ataupun terhadap salah satunya.

### 4) Al-Jurjani

Riba adalah kelebihan tanpa ganti rugi yang diisyaratkan oleh salah seorang yang berakad.<sup>44</sup>

Menurut Abdurrahman al-jaziri yang dimaksud dengan riba ialah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut aturan syara' atau terlambat salah satunya.

Syaikh Muhammad Abduh berpendapat bahwa yang dimaksud dengan riba ialah penambahan-penambahan yang diisyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan.

Institusi bunga (riba) telah menjadi bagian penting dari sistem perekonomian bangsa Arab seperti halnya sistem ekonomi di negara-negaralain. Sesungguhnya, bunga telah dianggap penting demi keberhasilan pengoperasian sistem ekonomi yang ada bagi masyarakat. Tetapi islam mempertimbangkan bunga itu suatu kejahatan yang

---

<sup>44</sup> Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Depok : Rajawali Pers, 2017),h.7.

menyebarkan kesengsaraan dalam kehidupan. Oleh karena itu, Al-Qur'an menyatakan haram terhadap bunga bagi kalangan masyarakat islam. Oleh karena bunga telah mendarah daging didalam kehidupan ekonomi masyarakat Islam, Allah yang maha mengetahui dan maha bijaksana, telah mewahyukan perintah-Nya terhadap larangan bunga (seperti halnya larangan terhadap alkohol) secara berangsur-angsur sehingga tidak begitu mengganggu kehidupan ekonomi masyarakat, serta menyebabkan kekecewaan dan kesulitan bagi masyarakat.<sup>45</sup>

Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa riba adalah suatu kelebihan yang terjadi dalam tukar-menukar barang yang sejenis atau jual beli barter, dan kelebihan tersebut disyaratkan dalam perjanjian. Jika kelebihan tersebut tidak disyaratkan dalam perjanjian itu tidak termasuk riba.

Larangan riba yang terdapat dalam al-Qur'an tidak diturunkan sekaligus, melainkan diturunkan dalam empat tahap. Tahap pertama menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang pada zahirnya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan mendekai atau *taqarrub* kepada Allah, sebagaimana firman Allah pada surat Ar-Ruum ayat 39.

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوًّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

---

<sup>45</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015), h.58

Artinya: *Dan suatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba ia tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).*<sup>46</sup>

Ayat di atas menerangkan bahwa siapa saja yang menafkahkan hartanya demi karena Allah, maka ia akan memperoleh kebahagiaan, sedang yang menafkahkan dengan riya“, serta untuk mendapatkan popularitas maka ia akan kecewa bahkan rugi. Adapun yang memberi hartanya sebagai hadiah untuk memperoleh keuntungan materi dibalik pemberiannya tersebut, maka itu bukanlah sesuatu yang baik walau tidak terlarang. Dan apa saja yang kamu berikan dari harta yang berupa riba yakni tambahan pemberian berupa hadiah terselubung, dengan tujuan agar harta tersebut bertambah, maka hal tersebut tidak berpahala disisi Allah. Karena Allah tidak memberkati pemberian seperti itu. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yakni sedekah yang suci yang dimaksudkan untuk meraih keridhaan disisi-Nya, maka bagi orang yang melakukan hal semacam itulah yang sungguh tinggi kedudukannya sehingga Allah akan melipat gandakan pahala tersebut.<sup>47</sup>

Harta yang kalian berikan kepada orang-orang yang memakan riba dengan tujuan agar harta tersebut bertambah, tidak suci di sisi Allah dan tidak akan diberkati. Sedangkan sedekah yang kalian berikan dengan tujuan mengharap ridha Allah tanpa riya dan mengharapkan imbalan, maka itulah orang-orang yang memiliki kebaikan berlipat ganda.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Semarang:CV. Toha Putra, 1989), h.326

<sup>47</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, Cet I, 2002, h. 72.

<sup>48</sup> *Ibid*, h. 73.

Tahap kedua, riba digambarkan sebagai sesuatu yang buruk. Allah mengancam akan memberi balasan yang keras kepada orang yahudi yang memakan riba, sebagaimana dalam firman-Nya dalam surat An-nisa ayat 16

وَالَّذِينَ يَأْتِيْنَهَا مِنْكُمْ فَعَاذُوهُمْ فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا  
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴿١٦﴾

Artinya: *Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir diantara mereka itu siksa yang pedih.*<sup>49</sup>

Ayat ini menjelaskan rincian sanksi yang menimpa orang-orang Yahudi dengan menyebut penyebab utamanya, yaitu bahwa mereka berlaku *zhalim*, tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya yang wajar. Disebabkan kezhaliman yang sangat besar sebagaimana dipahami dari kata *zhulmin* yang menggunakan tanwin bunyi nun. Salah satu bentuk kezhaliman besar orang Yahudi yaitu menghalangi manusia menuju jalan Allah, yakni pengharaman sebagian dari apa yang tadinya dihalalkan dengan disebabkan mereka memakan riba, perbuatan tersebut merupakan sesuatu hal yang tidak manusiawi padahal sesungguhnya mereka dilarang oleh Allah untuk mengambilnya. Dengan demikian mereka menggabungkan dua keburukan sekaligus, tidak manusiawi dan melanggar perintah Allah.

<sup>49</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Semarang:CV. Toha Putra), 1989), h.63

Tahap ketiga riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Para ahli tafsir berpendapat bahwa pengambilan bunga dengan tingkat yang cukup tinggi merupakan fenomena yang banyak dipraktikkan pada masa tersebut. Allah berfirman dalam surat ali-Imron ayat 130.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا  
اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.*<sup>50</sup>

Ayat di atas dimulai dengan panggilan kepada orang-orang yang beriman, disusul dengan larangan memakan riba. Dimulainya demikian memberi syarat, bahwa bukanlah sifat dan kelakuan orang-orang yang beriman memakan, yakni mencari dan menggunakan uang yang diperolehnya dari praktek riba. Menurut al-Shabuni sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Ghofur, ayat ini termasuk Madaniyah yang di dalamnya telah menerangkan keharamaan riba secara jelas namun bersifat *juz'i* tidak bersifat *kulli*, sebab pengharamannya hanya ditunjukkan pada *riba al-fahisy*, riba yang sangat buruk dan keji dimana dengan riba tersebut utang seseorang dapat menjadi berlipat-lipat.<sup>51</sup>

Riba atau kelebihan yang terlarang oleh ayat di atas adalah yang sifatnya *adh''afan mudha''afah* (مضاعفت أضعافا). Kata *adh''afan* (أضعافا)

<sup>50</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Semarang:CV. Toha Putra, 1989), h.53

<sup>51</sup> Abdul Ghofur, *Larangan Riba dalam al-Qur''an dan Aplikasinya pada Perbankan Syari''ah*, Jurnal Al-Ahkam, Volume XVIII, Ed II, 2007, h. 78.



adalah bentuk jamak dari *dhi''f* (ضعف) yang berarti serupa, sehingga yang satu menjadi yang dua. Kata *dhi''fain* (ضعفين) adalah bentuk ganda, sehingga jika anda mempunyai dua maka ia menjadi empat, *adh''afan* adalah berlipat ganda. Memang demikianlah kebiasaan yang terjadi dimasyarakat Jahiliyah, jika seseorang tidak mampu membayar utangnya dia ditawarkan atau menawarkan penangguhan pembayaran, dan sebagai imbalan penangguhan tersebut pada saatnya ketika membayar utang, dia membayarnya dengan ganda atau berlipat ganda.<sup>52</sup>

Sebagaimana yang dikutip oleh Abdullah Saed, Abduh dan Rashid Ridha yang merupakan pakar hukum Islam menegaskan bahwa bunga yang dilarang adalah yang berlipat ganda, Keterangan ini berdasarkan bukti faktual dalam praktek riba pada masa pra-Islam dan juga implikasi yang ditimbulkannya sehingga bunga yang tidak berlipat ganda tidaklah dilarang.<sup>97</sup> Riba yang diharamkan adalah riba yang mengandung salah satu dari tiga unsur berikut: mengandung paksaan, tambahan yang tak ada batasnya, atau berlipat ganda dan terdapat syarat yang memberatkan, seperti tingkat bunga yang terlalu tinggi.

Setiap utang yang jumlahnya kecil akan dapat meningkat dan terus berkembang menjadi besar yang akhirnya dapat menghabiskan seluruh kekayaan *muqtaridh*, dengan meningkat secara berlipat ganda bisa saja akan memberatkan pihak *muqtaridh* untuk melunasi utang-utangnya.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> *Ibid*, h. 216-217.

<sup>53</sup> Abdullah Saed, *Bank Islam dan Bunga*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet I, 2003, h.76.

Kata *adh''afan mudha''afah* bukanlah syarat bagi larangan ini. Dalam arti jika penambahan akibat penundaan itu sedikit, atau tidak berlipat ganda maka riba atau penambahan itu boleh. Kata *adh''afan mudha''afah* bukanlah syarat, tetapi sekedar menggambarkan kenyataan yang berlaku ketika itu. Memang, sepintas bahwa yang menghentikan praktek riba mengalami kerugian, tetapi dugaan itu tidak benar. Dengan meninggalkan riba akan terjalin hubungan harmonis antar anggota masyarakat, serta terbina kerja sama dan tolong-menolong yang pada akhirnya mengantarkan kepada kebahagiaan.<sup>54</sup>

Setelah larangan ini Allah mengingatkan agar bertaqwa kepada-Nya, yakni menghindari siksa-Nya, baik akibat melakukan riba maupun bukan, dan untuk diingat bahwa yang melanggar perintah ini, atau yang menghalalkan riba, maka ia terancam dengan ancaman yang sangat berat yakni api neraka yang disediakan untuk orang-orang kafir.

Riba adalah kejahatan ekonomi terbesar. Ia adalah penindasan terhadap yang butuh. Penindasan dalam bidang ekonomi dapat lebih besar dampaknya daripada penindasan dalam bidang fisik. Ia adalah pembunuhan sisi keamusiaan dan kehormatan manusia secara bersinambung. Tidak heran jika sekian banyak ulama salah satunya yaitu Muhammad Abduh yang menilai kafir bagi orang-orang yang melakukan praktik riba, walau ia mengucapkan kalimat syahadat dan secara formal melakukan sholat, tapi bagi kaum yang melakukan riba mereka serupa dengan orang-orang kafir yang terancam kekal di neraka.

Surat Ali Imran ayat 130 ini harus dipahami secara komprehensif dengan ayat 278-279 dalam surat al-Baqarah yang turun pada tahun ke-9

---

<sup>54</sup> *Ibid*, h. 39.

Hijriyyah. Pada tahap terakhir Allah dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Ini ayat terakhir yg diturunkan menyangkut riba.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ  
 فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ  
 رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan: riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.*<sup>55</sup>

Maksud dengan sisa riba mencakup semua bentuk bunga mencakup baik itu banyak maupun sedikit, sehingga setiap bentuk pinjaman dengan imbalan manfaat tertentu adalah riba. Salah satu bentuk riba yang dilakukan kaum Jahiliyyah dan diharamkan dalam al-Qur‘an adalah meminjamkan sejumlah dinar atau dirham dalam jangka waktu tertentu dengan sejumlah imbalan atau tambahan sesuai besar kecilnya pinjman yang telah disepakati.

Terdapat dua pernyataan penting sebagai akhir dari pembicaraan tentang riba dalam al-Qur‘an surat al-Baqarah: 279 yang jelas menunjukan pelarangannya yaitu :

<sup>55</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Semarang:CV. Toha Putra, 1989), h.38

- 1) Statemen “ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ ” (bagimu pokok hartamu), yang kemudian disusul dengan statemen kedua, “ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ” ( kamu tidak melakukan penganiayaan dan tidak pula dianiaya). Statemen pertama menunjukkan tentang penarikan pokok harta yang dipinjamkan oleh *muqridh* (pihak piutang) kepada *muqtaridh* ( pihak yang berhutang), pada sisi lain dijelaskan bahwa apa yang telah dilakukan oleh *muqridh* yang hanya meminta nilai pokok harta yang dipinjamkan kepada *muqtaridh* tersebut tidak merupakan perbuatan aniaya, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap *muqtaridh* ( لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ )
- 2) Masing-masing statemen di atas menunjukkan indikasi saling berkaitan, satu sama lain tidak dapat berdiri sendiri tanpa dukungan yang lainnya. Jika kedua statemen tersebut dipisah dengan cara mengabaikan salah satu darinya, maka akan terjadi pengkaburan makna dari maksud pesan al-Qur’an. Atas dasar itu, maka dalam penafsiran untuk menjelaskan makna riba harus memberi penekanan yang sama terhadap kedua statemen tersebut. Lebih parah lagi apabila dalam menafsirkannya hanya memperhatikan statemen “*falakum ruusu amwalikum*” dan mengabaikan statemen “*la tazlimuna wala tuzlamun*”. Karena statemen yang kedua pada dasarnya mencerminkan sebagai kerangka metodologi yang hampir diikuti oleh seluruh madzhab hukum Islam, sekaligus sebagai unsur pokok untuk mengetahui setiap perintah dan larangan dalam al-qur’an yang

dihasilkan melalui interpretasi yang mendalam terhadap makna yang relevan dari sebuah teks, juga dapat memberi perhatian terhadap penyebab-penyebab utama dari munculnya larangan dan perintah tersebut.<sup>56</sup>

Orang yang beriman adalah orang yang diliputi oleh rasa kasih sayang kepada sesama manusia, yang kaya kalau hendak memberikan piutang tidaklah bermaksud memeras keringat dan tenaga sesama manusia. Pada ayat ini Allah memperingatkan kepada orang-orang beriman bahwa jika masih ada sisa-sisa hidup dengan riba. Maka, mulai sekarang hendaklah dihentikan.

Riba adalah suatu kejahatan yang meruntuhkan hakikat tujuan Islam dan Iman. Ia menghancurkan leburkan ukhuwah yang telah tertanam disetiap hati manusia, riba benar-benar pemerasan manusia atas manusia. Segelintir manusia hidup menggoyang-goyangkan kaki, dari tahun ke tahun menerima kekayaan yang melimpah padahal manusia tersebut tidak bekerja dan berusaha.<sup>57</sup>

Pekerjaan melakukan riba adalah suatu perbuatan dosa besar yang wajib di jauhi dan ditinggalkan. Orang yang pernah melakukannya hendaklah berhenti dengan segera dan bertaubat. Allah telah mengancam siapa saja orang yang melakukan riba. Selain itu eksistensi riba tidak sesuai dengan sistem nilai Islam yang melarang semua bentuk pencarian

---

<sup>56</sup> Ash-Shadiq Abdurrahman Al-Gharyani, *Fatwa Mu'amalah Kontemporer*, Surabaya: Pustaka Progressif, Cet. I, 2004, h. 112

<sup>57</sup> Abdullah Saed, *Bank Islam dan Bunga*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet II, 2004, h. 46-47.

kekayaan secara *akl amwal an-nas bil baathil* (memakan kekayaan orang lain dengan jalan batil).

b. Macam dan Sebab Haram

Secara garis besar, riba dikelompokkan menjadi dua. Masing-masing adalah riba utang piutang (riba *dayn*) dan riba jual beli (riba *ba'i*). Kelompok pertama terbagi lagi menjadi riba *qardh* dan riba jahiliyah.<sup>58</sup> Adapun kelompok kedua riba jual beli,<sup>59</sup> terbagi menjadi riba *fadh*l dan riba *nasi'ah*. Keempat riba tersebut adalah :

- 1) Riba *qardh* yaitu Suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang (*muqtaridh*).<sup>60</sup> Sedangkan menurut Wahbah az-Zuhaili jika seseorang meminjamkan sejumlah uang kepada orang lain dengan kesepakatan bahwa orang tersebut akan mengembalikan dengan tambahan tertentu, atau dengan mensyaratkan tambahan dalam pembayaran setiap bulan atau setiap tahun, itu termasuk ke dalam *riba qardh*.
- 2) Riba jahiliyah terjadi karena adanya utang yang dibayar lebih dari pokoknya karena peminjam tidak mampu melunasi utangnya setelah jatuh tempo. Ketidakmampuan mengembalikan utang ini kemudian dimanfaatkan oleh *muqaridh* untuk mengambil keuntungan. Utang dibayar lebih dari pokoknya, karena peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang telah ditetapkan. Qatadah menjelaskan riba Jahiliyyah adalah seseorang yang menjual barangnya

<sup>58</sup> Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: Prenamedia, 2008), h. 239

<sup>59</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2017), h. 83

<sup>60</sup> Idri, *Hadis Ekonomi*, Jakarta: Prenamedia Group, Cet. I, 2016, h. 192.



secara tempo hingga waktu tertentu. Apabila telah datang saat pembayaran dan pembeli tidak mampu membayarnya, Maka pemebeli memberikan bayaran tambahan atas penangguhan utang tersebut.<sup>61</sup>

- 3) Riba *nasi'ah* Nasi'ah berasal dari kata dasar nasa' yang berarti mengakhirkan. Sedangkan pengertian riba nasi'ah adalah tambahan pembayaran atas jumlah modal yang disyaratkan terlebih dahulu yang harus dibayar oleh peminjam kepada yang meminjam tanpa resiko sebagai imbalan dari jarak waktu pembayaran yang telah diberikan. Bentuknya yaitu seseorang memberikan utang kepada orang lain sampai batas waktu yang ditentukan seperti satu bulan atau satu tahun, kemudian jika masa tiba pembayaran dan orang yang berutang tidak mampu melunasinya, maka pemberi utang lalu menanggukhan pembayarannya dengan syarat nilai pembayaran utangnya bertambah karena riba.<sup>62</sup>

Contoh: Zaman jahiliyah, jika seorang debitur berhutang kepada krediturnya, tetapi tidak punya uang untuk melunasi ketika jatuh tempo, maka ia akan minta tambahan waktu pada kreditur (pemberi utang). Kreditur mengabulkan permintaan itu, tetapi dengan menentukan bahwa jumlah utang pokoknya diperbesar. Demikianlah, waktu diperpanjang dan jumlah utang pun diperbesar pula. Tambahan atas utang pokok itulah yang disebut riba.

<sup>61</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.94

<sup>62</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015), h.62

Transaksi yang disebutkan diatas adalah contoh tipikal riba nasi'ah. Menurut para fukaha, riba nasi'ah mengandung tiga elemen berikut :

- a) Kelebihan dari utang pokok;
  - b) Menentukan besarnya kelebihan tersebut dalam hubungannya dengan waktu;
  - c) Kelebihan tersebut menjadi syarat berlangsungnya transaksi pinjaman.
- 4) Riba *fadh*l adalah nama bunga pada transaksi barter komoditas, yaitu riba yang semata-mata berlebihan pembayaran, baik sedikit maupun banyak.<sup>63</sup> Fadl berarti kelebihan yang dikenakan dalam pertukaran barang sejenis dengan kadar yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk barang ribawi.<sup>64</sup> Riba fadl ini berlaku hanya timbangan atau tukaran harta yang sama jenis dan bentuknya seperti emas dengan emas, perak dengan perak.<sup>65</sup>

Ribanya terletak pada pembayaran tambahan oleh debitur kepada kreditur dalam pertukaran komoditas sejenis, seperti gandum dengan gandum, bur dengan bur, kurma dengan kurma, dan sebagainya.

Sistem pertukaran barter komoditas amatlah umum di Arabia pada masa awal-awal islam. Orang biasa menukarkan barang dengan barang. Terutama si miskin biasa meminjam bahan makanan pokok kepada si kaya dengan janji akan membayarnya nanti dengan

---

<sup>63</sup> *Ibid*, h. 63

<sup>64</sup> Muhammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan Dalam Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet. 1, 1990, h. 77.

<sup>65</sup> Abdurrahman Ghazaly, et al, *Fikih Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010, h. 220.

tambahan pada waktu jatuh tempo. Ini merupakan penindasan kepada kaum miskin oleh kaum kaya dan Islam menghapuskannya. Seperti yang telah kita ketahui, Nabi Muhammad Saw menyatakan bahwa transaksi seperti itu adalah riba dan oleh karena itu haram.

Menurut fukaha, unsur-unsur riba *fadhhl* adalah sebagai berikut:

- a) Kedua barang yang dipertukarkan adalah homogen atau sejenis, seperti emas dengan emas, jagung dengan jagung
- b) Jumlah keduanya berbeda dalam timbangan maupun takaran. Jika emas dipertukarkan dengan emas dan jumlah serta kualitasnya sama serta tunai, maka itu bukan bunga. Jika tidak sama, maka kelbihannya adalah bunga.
- c) Transaksi itulah mesti tidak berlangsung tunai. Jika satu *guinea* diberikan sebagai imbalan bagi  $1\frac{1}{2}$  *guinea* di masa yang akan datang maka kelebihan itu adalah bunga.<sup>66</sup>

Berdasarkan dua kelompok riba tersebut, terdapat perbedaannya, yaitu antara lain:

- 1) Riba *ba'i* diharamkan untuk *sad az-zari'ah*, sedangkan riba *dayn* diharamkan karena zatnya.
- 2) Riba *ba'i* hanya dalam 6 (enam) jenis harta, sedangkan *riba dayn* berlaku pada seluruh jenis harta sesuai dengan ijma para ulama. Indikasinya bahwa riba yang dilakukan orang jahiliyah yang kemudian diharamkan oleh Al-Qur'an objek transaksinya adalah unta. Dan unta tidak termasuk salah satu dari 6 (enam) harta riba.

---

<sup>66</sup> Muhammad Syarif, *Sistem Ekonomi Prinsip Dasar Islam*, (Jakarta: PrenadaMedia, 2016), h. 224

c. Pendapat Ulama tentang ‘Illat Riba

Ulama sepakat menetapkan riba *fadhhl* pada tujuh barang, seperti terdapat pada nash, yaitu emas, perak, gandum, syair, kurma, garam dan anggur kering. Pada benda-benda ini adanya tambahan pada pertukaran sejenis adalah diharamkan.<sup>67</sup>

Menurut ulama Hanafiyah dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad Ibn Hanbal, riba *fadhhl* ini hanya berlaku dalam timbangan atau takaran harta yang sejenis, bukan terhadap nilai harta. Apabila yang dijadikan ukuran adalah nilai harta, maka kelebihan yang terjadi tidak termasuk riba *fadhhl*.<sup>68</sup>

Adapun pada barang selain itu, para ulama berbeda pendapat:

- 1) Zhahiriyah hanya mengharamkan ke tujuh benda tersebut.
- 2) Menurut pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad dan Abu Hanifah, riba *fadhhl* terjadi pada setiap jual-beli barang yang sejenis dan yang ditimbang.
- 3) Iman Syafi’i dan sebagian pendapat Imam Ahmad berpendapat bahwa riba *fadhhl* dikhususkan pada emas dan perak dan makanan meskipun ditimbang.
- 4) Sa’id Ibn Musayyab dan sebagian riwayat Ahmad mengkhususkannya pada makanan jika ditimbang
- 5) Imam Malik mengkhususkannya pada makanan pokok.

---

<sup>67</sup> Rahmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.265

<sup>68</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, ), h.184

#### d. Pinjaman Konsumtif dan Produktif

Pinjaman konsumtif merupakan pinjaman yang dipergunakan untuk membiayai kebutuhan pokok, seperti makan dan obat-obatan. Kebutuhan konsumtif dapat dibedakan atas kebutuhan primer (pokok/dasar) dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok, baik berupa barang, seperti makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal, maupun berupa jasa, seperti pendidikan dasar dan pengobatan. Adapun kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan, yang secara kuantitatif maupun kualitatif lebih tinggi atau lebih mewah dari kebutuhan primer, baik berupa barang, seperti makanan dan minuman, pakaian, perhiasan, bangunan rumah, kendaraan, maupun berupa jasa seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, pariwisata, hiburan.<sup>69</sup>

Moh. Hatta dalam pinjaman konsumtif menghukumi riba, menurutnya bahwa tujuan pengambilan pinjaman ini pada zaman Jahiliyah ialah untuk tujuan konsumsi (tujuan konsumtif). Sehingga *muqtaridh* harus menderita bila tenggang waktu pembayaran telah tiba, sementara *muqtaridh* belum mempunyai uang. Itulah sebabnya Moh. Hatta menghukumi riba pada pinjaman tersebut. Menurut sifat keharaman dari praktik riba, karena pihak peminjam dalam keadaan sulit ketika terjadi akad dilaksanakan, kesulitan itu tetap melekat pada saat mengembalikan dan juga harus membayar tambahan utangnya. Dari hal tersebut timbul sumber eksploitasi, penindasan, gharar terhadap hajat mereka yang tidak berkecukupan.<sup>70</sup>

<sup>69</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*, h. 168.

<sup>70</sup> Edi Suandi, *Riba dan Bunga Bank Perspektif Moh. Hatta*, Jurnal Ekonomi, Vol VII, 2015, h. 3.

Pinjaman produktif yaitu pinjaman yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi. Tetapi pengertian produksi tidak boleh diartikan dengan sempit karena ada satu kegiatan yang dinamakan produktif tetapi tidak menghasilkan ekonomi sebagai contoh adalah pinjaman untuk kegiatan sosial yaitu pembangunan sekolah. Moh. Hatta menghukumi halal pada pinjaman produktif ini karena bunga yang diambil adalah hasil dari usaha produksi. Bunga yang diambil juga berbeda dengan bunga yang terdapat pada riba, karena bunga yang terdapat dalam peminjaman ini terbatas sedangkan dalam riba bunganya berlipat-lipat.

Sebagaimana yang dikutip Abdullah Saed, ad-Dawalibi seorang tokoh kontemporer Syiria, membedakan antara pinjaman produktif dan pinjaman konsumtif, dan menyatakan bahwa bunga pinjaman produktif adalah boleh, sedangkan bunga pinjaman konsumtif tidak boleh. Pernyataan ad-Dawalibi berdasarkan penjelasan dalam al-Qur'an tentang masalah riba. Menurutnya, permasalahan riba di dalam al-Qur'an terkait dengan konteks meringankan penderitaan fakir, miskin, kelompok masyarakat lemah, dan pihak yang terbelenggu oleh beban hutang yang tidak mampu untuk melepaskan diri dari jeratan hutangnya. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka larangan riba dalam konteks Al Qur'an berkaitan dengan pinjaman konsumtif.<sup>71</sup> Di samping itu, para modernis juga mengaitkannya dengan praktek riba pada masa pra-Islam. Karena pada masa itu dalam skala yang luas tidak terdapat fakta yang

---

<sup>71</sup> Abdullah Saeed, *Bank Islam Dan Bunga*, h. 78-79



menunjukkan adanya pinjaman yang digunakan untuk tujuan produksi. Keterangan tersebut tidak berkaitan langsung, maka pinjaman untuk investasi menurut pengamatan para modernis di luar fenomena Qur'ani. Oleh karena itu, aspek larangannya diketahui melalui pertimbangan rasional. Berdasarkan ini, unsur ketidakadilan menjadi pertimbangan atas pelarangannya.

Para Ulama berpendapat bahwa riba yang diperbolehkan jika tidak mengandung unsur dzulm dan berlipat ganda, tapi menurut Syafi'i Antonio selain alasan tersebut masih ada lagi sebab pembenaran pengambilan riba, yaitu dalam keadaan dharurat. Dharurat secara bahasa bermakna keperluan yang sangat mendesak, Imam Suyuti dalam bukunya *al-Asybab wan-Nadzair* menegaskan bahwa dharurat adalah suatu keadaan *emergency* dimana jika seseorang tidak melakukan suatu tindakan dengan cepat akan membawanya ke jurang kehancuran.<sup>72</sup>

#### e. Pengaruhnya dalam Transaksi Ekonomi

Kini riba yang dipinjamkan merupakan asas pengembangan harta pada perusahaan-perusahaan. Itu berarti akan memusatkan harta pada penguasaan para hartawan, padahal mereka hanya merupakan sebagian kecil dari seluruh anggota masyarakat, daya beli mereka pada hasil-hasil produksi juga kecil. Pada waktu yang bersamaan, pendapatan kaum buruh yang berupa upah atau yang lainnya, juga kecil. Maka, daya beli kebanyakan anggota masyarakat kecil pula.

---

<sup>72</sup> Jalaluddin Abdurrahman as-Suyuti, *al-Asybab wan-Nadzair fi Quwaidh wa Furu' Fiqh Asy-Syafiyyah*, Beirut: Darul Kutub al-Amaliyah, 1993, h. 85.

Hal ini merupakan masalah penting dalam ekonomi, yaitu siklus-siklus ekonomi. Hal ini berulang kali terjadi disebut krisis ekonomi. Para ahli ekonomi berpendapat bahwa penyebab utama krisis ekonomi adalah bunga yang dibayar sebagai pinjaman modal atau dengan singkat bisa disebut riba.

Riba menyebabkan berkurangnya proyek di bidang produksi barang karena para pemilik modal pada umumnya menginginkan keuntungan tanpa mau menghadapi risiko kerugian. Maka cara yang aman adalah memberikan kredit dan mendapatkan *interest* (bunga). Dan cara ini terlalu memberikan andil dalam memajukan ekonomi sebuah negara.

Riba menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat. dalam teori ekonomi dijelaskan bahwa meningkatnya jumlah uang yang beredar disebabkan banyaknya kredit yang dikucurkan bank dan para pemilik modal di suatu negara. Hal ini akan berdampak menurunnya jumlah uang yang beredar tidak diikuti dengan banyaknya jumlah barang yang dan jasa yang tersedia.

Riba menyebabkan tingginya harga barang dan jasa. Karena para pemilik usaha membiayai usaha mereka dengan kredit berbunga, maka mereka terpaksa menaikkan harga jual barang produksi untuk menutupi biaya produksi yang begitu tinggi disebabkan bunga kredit yang mesti mereka bayar.

#### f. Hikmah Di Haramkan

Sudut pandang kaidah fikih prinsip yang berlaku umum adalah membangun hukum syariat atas dasar *illat* (sebab, alasan), bukan atas

dasar hikmah. Hal itu karena illat adalah suatu karakteristik yang senyawa dan baku, serta merupakan indikasi kuat bagi suatu hukum. Lain halnya dengan hikmah, yang biasanya bersifat relative.<sup>73</sup> Hikmah yang tampak jelas dibalik pengharaman riba adalah mewujudkan persamaan yang adil diantara pemilik harta (modal) dan usaha, serta memikul resiko dan akibatnya secara berani dan penuh rasa tanggung jawab. Inilah pengertian “keadilan Islam”.<sup>74</sup>

Islam memperketat urusan riba dan memperkeras keharamannya, sesungguhnya maksud tersebut untuk memelihara kemaslahatan manusia baik akhlak, hubungan sosial, maupun ekonominya.

Para ulama Islam menyebutkan beberapa alasan rasional mengenai hikmah diharamkannya riba, karena syariat Islam memandang riba sebagai suatu tindakan kriminal agama dan sosial terburuk. Riba merupakan pangkal kejahatan dan dosa, maka tidaklah mengherankan jika Allah mengumumkan perang bagi siapa saja yang berinteraksi dengan riba. hal ini dikarenakan adanya bahanya yang nyata dan berbagai keburukan yang menyertainya, diantaranya yaitu:

- 1) Bahaya riba bisa menjadikan orang egois, karena ia hanya mengutamakan kemaslahatan dirinya sendiri, sehingga ia tidak memiliki semangat pengorbanan, saling tolong-menolong dalam kebaikan dan taqwa. Hal ini bisa mengakibatkan ikatan persaudaraan bercerai-berai, dan seakan-akan ia menjadi orang yang kejam dan bengis di mata masyarakat. Ia hanya mementingkan harta dan mengisap darah manusia dengan keserakahan dan ketamkannya.

---

<sup>73</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Bunga Bank Haram*, Terj. Setiawan Budi Utomo Jakarta: Akbar, 2002 h. 50.

<sup>74</sup> *Ibid*, h. 52.

- 2) Orang yang bergantung kepada riba akan menghalangi dari melakukan usaha, karena apabila pemilik uang sudah dapat menambah hartanya dengan melakukan transaksi riba, baik tambahan itu diperoleh secara kontan atau berjangka, maka ia akan meremehkan persoalan mencari penghidupan, sehingga nyaris ia tidak mau menanggung resiko berdagang dan usaha-usaha lainnya. Hal ini akan mengakibatkan terputusnya kemanfaatan bagi masyarakat. Kemaslahatan dunia tidak akan dapat diwujudkan kecuali dengan adanya perdagangan, ketrampilan, perusahaan dan pembangunan.<sup>75</sup>
- 3) Orang yang pada umumnya memberikan pinjaman adalah orang kaya, sedang yang meminjam adalah orang miskin. Jika dalam pinjaman tersebut terdapat unsur riba dan orang yang meminjam merasa didzolomi, ini dapat melahirkan permusuhan dan kebencian diantara sesama umat manusia. Riba juga dapat menghapuskan rasa kasih sayang, meruntuhkan ikatan kemanusiaan dan menumbuhkan rasa benci, iri dalam hati.

Menurut Sayid Sabiq, riba diharamkan karena mengandung akibat negatif yang sangat besar diantaranya:

- 1) Riba dapat menimbulkan permusuhan antara pribadi dan menghabiskan seluruh semangat kerja sama atau saling tolong menolong. Sedangkan semua agama terutama islam sangat menyeru perbuatan saling tolong menolong dan mengecam orang yang mengutamakan kepentingan sendiri dan mengeksploitasi kerja keras orang lain.

---

<sup>75</sup> Yusuf Qardhawi, *Al-Halal wal-Haram fil-Islam*, Jakarta: Robbani Press, 2009, h. 307.

- 2) Dapat menimbulkan mentalitas pemboros, malas bekerja, penimbunan harta tanpa kerja keras, bagaikan benalu yang tumbuh diatas jerih payah orang lain. Islam sangat menghargai kerja keras dan menghormati orang yang menjadikan pekerjaan sebagai mata pencaharian.
- 3) Riba merupakan salah satu cara menjajah. Karena itu orang berkata: penjajah berjalan dibelakang pendagang atau pendeta.<sup>76</sup>

Menurut Ali Jurjawi, riba akan mengakibatkan:

- 1) Adanya eksploitasi (pemerasan) oleh si kaya kepada si miskin.
- 2) Uang yang dimiliki si kaya tidak disalurkan kepada hal-hal yang produktif misalnya pertanian, industri, dan sebagainya yang dapat menciptakan peluang kerja yang sangat bermanfaat bagi masyarakat dan pemilik modal sendiri. Tetapi modal tersebut disalurkan ke dalam pengkreditan berbunga yang tidak produktif.
- 3) Mengakibatkan kebangkrutan usaha dan pada akhirnya bisa mengakibatkan konflik, jika si peminjam tidak sanggup mengembalikan pinjaman dan bunganya.<sup>77</sup>

Diantara hikmah diharamkannya riba dalam Islam adalah:

- 1) Mengarahkan seorang Muslim supaya menginvestasikan hartanya pada usaha yang bersih, jauh dari kecurangan dan penipuan, serta terhindar dari segala tindakan yang menimbulkan kesengsaraan dan kebencian di antara kaum muslimin.

---

<sup>76</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz III, Libanon: Darul Kutub Al Adabiyah, 1971, h.49

<sup>77</sup> Syekh Ali Ahmad Al-Jurjawi terjemah, *Falsafah dan Hukum Islam*, Semarang: CV Assyifa, h. 375

- 2) Menyumbat seluruh jalan yang membawa seorang Muslim kepada tindakan memusuhi dan menyusahkan saudaranya sesama Muslim yang berakibat pada lahirnyacelaan serta kebencian dari saudaranya.
- 3) Menjadikan seorang muslim dari perbuatan yang dapat membawanya kepada kebinasaan. Karena memakan harta riba itu merupakan kedurhakaan dan kezaliman, sedangkan akibat dari kedurhakaan dan kezaliman itu ialah penderitaan.
- 4) Menimbulkan pintu-pintu kebaikan di hadapan seorang Muslim untuk mempersiapkan bekal di akhirat kelak dengan meminjami saudaranya sesama Muslim tanpa mengambil manfaat (keuntungan), mengutangnya, menanggukhan utangnya hingga mampu membayarnya, memberinya
- 5) kemudahan serta menyayangnya dengan tujuan semata-mata mencari keridhaan Allah. Keadaan ini dapat menyebarkan kasih sayang dan ruh persaudaraan yang tulus di antara kaum muslimin.<sup>78</sup>

## B. Tinjauan Pustaka

Setelah melakukan beberapa telaah pada beberapa penelitian. Ada beberapa sumber yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

Penelitian yang dilakukan Amelia Andriyani (2017) dalam skripsinya yang berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Hutang Piutang Bersyarat (Studi kasus di Desa Tri Makmur Jaya Kec. Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang), yang menjelaskan bahwa Di kalangan warga masyarakat desa Tri Makmur Jaya Kec. Menggala Timur terdapat praktik

---

<sup>78</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 250



utang piutang bersyarat dimana seseorang berhutang kepada juragan dan juragan memberikan syarat yaitu orang yang berhutang harus memiliki tambak yang sudah ada ikannya. Selanjutnya pada waktu panen hasilnya harus dijual pada warga yang ditetapkan juragan dengan harga yang dibawah standar umum pada saat panen.<sup>79</sup>

Adapun persamaan dengan skripsi tersebut ialah terletak pada topik pembahasannya yaitu sama-sama membahas utang piutang. Sedangkan perbedaannya adalah si penulis membahas pelaksanaan utang piutang yang terdapat tambahan dalam pengembaliaannya. Berbeda dengan skripsi Amelia Andriyani yang lebih fokus terhadap utang piutang yang disertai syarat penjualan hasil panen yang ditetapkan oleh kreditur.

Etika Yolán Melati (2019) dalam skripsinya yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam tentang Sistem Tanggung Renteng dalam Pembayaran Hutang* (Studi PNM Mekaar Desa Banjaran Kec. Padang Cermin Kab. Pesawaran ), menyatakan bahwa dalam pelaksanaan pembayaran utang piutang yang dilakukan oleh nasabah kepada pihak PNM Mekaar terjadi Sistem Tanggung Renteng. Yaitu, apabila salah satu nasabah mendapatkan kesulitan dalam membayar utangnya, maka nasabah lain yang termasuk kelompok dari pihak yang berhutang lah yang akan menanggung pembayaran utang tersebut. Karena itu lah maka akan terdapat kesenjangan sosial antara nasabah satu dengan yang lainnya.<sup>80</sup>

---

<sup>79</sup> Amelia Andriyani, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Hutang Piutang Bersyarat* (Studi kasus di Desa Tri Makmur Jaya Kec. Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang), (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2017), h. i.

<sup>80</sup> Etika Yolán Melati, *Tinjauan Hukum Islam tentang Sistem Tanggung Renteng dalam Pembayaran Hutang* (Studi PNM Mekaar Desa Banjaran Kec. Padang Cermin Kab. Pesawaran ), (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2019), h. 6

Adapun persamaan skripsi tersebut dengan penelitian yang dibuat penulis ini terletak pada substansinya yang sama yaitu sama-sama mengkaji tentang utang piutang pada PNM Mekaar. Sedangkan perbedaannya adalah penulis meneliti tentang pelaksanaan utang piutang yang terdapat tambahan dalam pengembaliaannya. Berbeda dengan skripsi Etika Yolana Melati yang lebih fokus terhadap utang piutang yang disertai sistem tanggung renteng.

Skripsi yang ditulis oleh Abi Hasan Sadili yang berjudul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pinjam Meminjam Di Koperasi Simpan Pinjam Karya Mekaar di Desa Penyadap Kecamatan Solokan Jeruk Kabupaten Bandung menjelaskan bahwa di koperasi Simpan Pinjam karya Mekaar ini memberikan pinjaman uang kepada anggotanya disertai jasa sebesar 2% yang dibayarkan 10 bulan dengan nominal 1-10 juta. Dan biaya jasa 2% tersebut menjadi keuntungan pihak koperasi. Ditinjau hukum ekonomi syariah, dalam pelaksanaannya ternyata mendatangkan kemaslahatan bagi para anggotanya, terutama dalam membantu memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Namun disetiap pinjaman yang diberikan oleh pihak koperasi ada jasa 2% yang diperjanjikan sehingga hal tersebut tergolong kepada *riba qardh*.<sup>81</sup>

Adapun persamaan dengan penulis ialah sama-sama membahas tentang utang piutang serta membahas perihal riba. Sedangkan perbedaan dengan skripsi yang akan penulis buat ini adalah praktik utang piutang di lokasi yang berbeda karena tiap lokasi akan berbeda praktiknya.

---

<sup>81</sup> Abi Hasan Sadili, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pinjam Meminjam Di Koperasi Simpan Pinjam Karya Mekaar* di Desa Penyadap Kecamatan Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2018), h.i

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Bin Muhammad Ath-thayar, et al. 2009. *Ensiklopedi Fiqh Muamalah Dalam Pandangan Fikih 4 Madzhab*. Yogyakarta: CV Pustaka Setia.
- Abdul Rahman Ghazali. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta : Kencana.
- Al-Qur'an, Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Semarang: CV. Toha Putra.
- Aziz Abdul Dahlan. 2000. *Ensiklopedia Hukum Islam, Jilid 5*. Jakarta: Hoeve
- Darsono. 2017. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Departemen Agama RI. 2002. *Mushaf Al-Kamil: Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: CV Darus Sunnah.
- Dessy Anwar. 2005. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Amalia.
- Haroen Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Heri Susarsono. 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Iqbal Zamir. 2015. *Pengantar Keuangan Islam Teori dan Praktik*. Jakarta: Prenamedia
- Jafar Khumedi. 2016. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. (Lampung: Permatanet.
- Mardani. 2017. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Depok: Rajawali Pers.
- Mudjieb M. Abdul. 2002. *Kamus Istilah Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus
- Muslich, Ahmad, Wardi. 2013. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah.
- Muslichuddin Muhammad. 1990. *Sistem Perbankan Dalam Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mustofa Imam. 2016. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nawawi Mustofa. 2017. *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Rahmat Syafe'i. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia.

- Rozalinda. 2016. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sahroni Oni. 2017. *Ushul Fikih Muamalah*. Depok: Rajawali Pers.
- Said Ramadan. 1991. *Keunikan dan Keistimewaan Hukum Islam*. Jakarta: Firdaus.
- Sharif Chaundhry Muhammad. *Sistem Ekonomi Prinsip Dasar Islam*. 2016. Jakarta: PrenaMedia
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & G*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suhendi Hendi. 2005. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Sultan Remy Sjahdeini. 2007. *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Umum Grafiti.
- Susiadi. 2015. *Metode Penelitian*. Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negri Raden Intan Lampung.
- Syafe'i Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Taufiq Ahmad Harahap. 2017. *Tantangan dan Peluang Lembaga Keuangan Syariah* Dalam Jurnal Bisnis Corporate Vol.2 no.2
- Wahbah Al-Zuhaili. *Al-Fiqh Al-Islami*, V/3792.

### **Jurnal**

- Abi Hasan Sadili, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pinjam Meminjam Di Koperasi Simpan Pinjam Karya Mekaar di Desa Penyadap Kecamatan Solokan Jeruk Kabupaten Bandung*, Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2018.
- Etika Yolani Melati, *Tinjauan Hukum Islam tentang Sistem Tanggung Renteng dalam Pembayaran Hutang Studi PNM Mekaar Desa Banjaran Kec. Padang Cermin Kab. Pesawaran*, Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2019.
- Amelia Andriyani, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Hutang Piutang Bersyarat Studi kasus di Desa Tri Makmur Jaya Kec. Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang, Lampung*: UIN Raden Intan Lampung, 2017.

**Sumber on-line**

[Www.pnm.co.id/bussiness/pnm-mekaaar](http://www.pnm.co.id/bussiness/pnm-mekaaar), pukul 10.00 WIB, tanggal 03 maret 2020

[Www.pnm.co.id/abouts/sejarah-pnm](http://www.pnm.co.id/abouts/sejarah-pnm) , pukul 20.30 WIB, tanggal 05 maret 2020

[Http://id.m.wikipedia.org/wiki/Permodalan\\_Nasional\\_Madani](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Permodalan_Nasional_Madani) , pukul 10.45 WIB, tanggal 03 maret 2020

